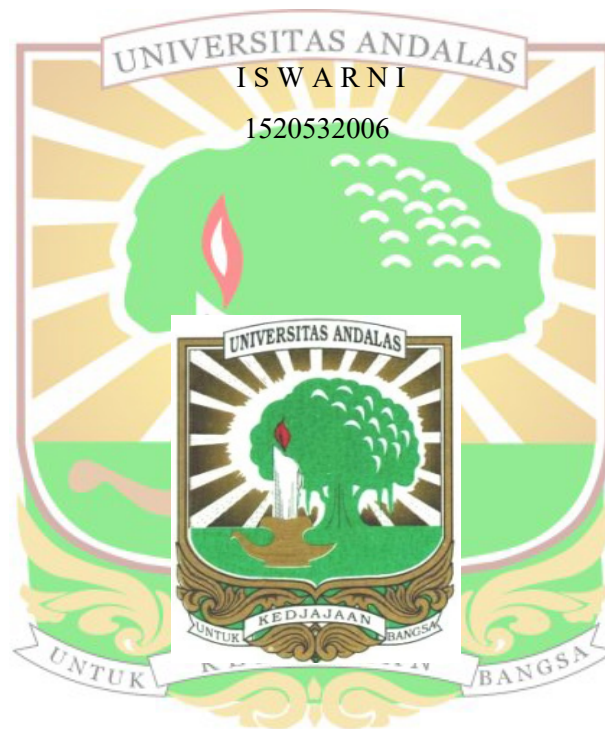


ANALISIS PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI  
(STUDI KASUS DINAS KOPERASI DAN UMKM  
PROVINSI SUMATERA BARAT)

Tesis



**PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2017**

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI  
(STUDI KASUS DINAS KOPERASI DAN UMKM  
PROVINSI SUMATERA BARAT)

I S W A R N I  
1520532006

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Magister Sains pada  
Program Studi Magister Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas**

**PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2017**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI  
(STUDI KASUS DINAS KOPERASI DAN UMKM  
PROVINSI SUMATERA BARAT)**

Oleh : I S W A R N I ( 1520532006)

Dibawah bimbingan : Dr. Hefrizal Handra, M.Soc. Sc dan Dr. Suhairi, M.Si, Ak

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan dana dekonsentrasi bidang Koperasi dan UMKM serta permasalahan yang dihadapi pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan membandingkan kesesuaian fakta dilapangan dengan peraturan terkait dengan pengelolaan dana dekonsentrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 (enam) indikator yang digunakan dalam mengevaluasi penganggaran dana dekonsentrasi dapat disimpulkan : (i) pada tahun 2013; 2 (dua) indikator sesuai dan 4 (empat) indikator tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tingkat kesesuaian sebesar 33,33% dengan kriteria penilaian **tidak sesuai**, (ii) tahun 2014; 3 (tiga) indikator sesuai dan 3 (tiga) indikator tidak sesuai aturan yang berlaku, tingkat kesesuaian sebesar 50% dengan kriteria penilaian **tidak sesuai**, (iii) tahun 2015; 1 (satu) indikator sesuai dan 5 (lima) indikator tidak sesuai aturan yang berlaku, tingkat kesesuaian sebesar 16,67% dengan kriteria penilaian **sangat tidak sesuai**. Dari 12 (dua belas) indikator yang digunakan dalam mengevaluasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dapat disimpulkan bahwa : (i) pada tahun 2013; 9 (sembilan) indikator sesuai dan 3 (tiga) indikator lagi tidak sesuai aturan yang berlaku, tingkat kesesuaian sebesar 75% dengan kriteria penilaian **cukup sesuai**, hal ini juga terjadi pada tahun 2014 dan 2015. Dari 7 (tujuh) indikator yang digunakan dalam mengevaluasi pelaporan dana dekonsentrasi dapat disimpulkan bahwa pada (i) tahun 2013; 5 (lima) indikator sesuai dan 2 (dua) indikator lagi tidak sesuai aturan yang berlaku, tingkat kesesuaian sebesar 71,43% dengan kriteria penilaian **cukup sesuai**, hal ini juga terjadi pada tahun 2014 dan 2015

Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan dana dekonsentrasi antara lain : (1) total pagu anggaran yang berubah dan terbatasnya waktu penyusunan RKA-KL, (2) prosedur penetapan pengelola dana dekonsentrasi belum sesuai aturan yang berlaku, (3) belum adanya sinkronisasi kegiatan dana dekonsentrasi dengan kegiatan APBD Prov. Sumbar (4) terjadinya tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi (5) terlambatnya penyampaian petunjuk teknis beberapa kegiatan dana dekonsentrasi (6) prosedur pelaksanaan teknis beberapa kegiatan belum sesuai aturan yang berlaku (7) kurangnya akuntabilitas pelaporan dana dekonsentrasi oleh SKPD.

Kata Kunci: Dana Dekonsentrasi, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan

**ANALYSIS OF DECONCENTRATION FUND MANAGEMENT  
(CASE STUDY OF COOPERATIVE DEPARTMENT AND UMKM  
WEST SUMATERA PROVINCE)**

By: I S W A R N I (1520532006)

Under guidance: Dr. Hefrizal Handra, M.Soc. Sc and Dr. Suhairi, M. Si, Ak

Abstract

This study aims to determine and analyze budgeting, implementation and reporting deconcentrated funds in the field of Cooperatives and SMEs and problems faced at the Office of Cooperatives and SMEs West Sumatra Province. The method used in this research is descriptive qualitative method. The data has been collected through interview process, observation and documentation. Data analysis is done by comparing the fact matches in the field with regulation related to deconcentration fund management.

The results showed that from 6 (six) indicators used in evaluating deconcentration fund budgeting can be concluded: (i) in 2013; 2 (two) indicators are appropriate and 4 (four) indicators are not in accordance with the applicable rules, the suitability level of 33.33% with the criteria of assessment is not appropriate, (ii) in 2014; 3 (three) indicators are appropriate and 3 (three) indicators are not in accordance with the applicable rules, the level of conformity of 50% with the criteria of assessment is not appropriate, (iii) 2015; 1 (one) indicator is appropriate and 5 (five) indicators are not in accordance with the applicable rules, the degree of compliance of 16.67% with the criteria of assessment is very inappropriate. Of the 12 (twelve) indicators used in evaluating the implementation of deconcentration funds, it can be concluded that: (i) in 2013; 9 (nine) indicators are appropriate and 3 (three) more indicators are not in accordance with the applicable rules, the suitability rate of 75% with the criteria of assessment is quite appropriate, it also occurs in 2014 and 2015. Of the 7 (seven) indicators used in evaluating Reporting of deconcentration funds can be concluded that in (i) in 2013; 5 (five) indicators are appropriate and 2 (two) more indicators are not in accordance with the applicable rules, the suitability rate of 71.43% with the assessment criteria is quite appropriate, it also happens in 2014 and 2015

The problems faced related to the implementation of deconcentration fund are: (1) total budget ceiling change and limited time of RKA-KL preparation, (2) procedure of determination of deconcentration fund manager not according to prevailing rules; (3) no synchronization of deconcentration fund activity with APBD Prov. West Sumatra (4) the overlapping of central and regional authorities in the implementation of deconcentration funding activities (5) late delivery of technical guidance of some deconcentration fund activities (6) technical implementation procedures of some activities not in accordance with prevailing regulations (7) lack of accountability reporting of deconcentrated funds by SKPD.

Keywords: Deconcentration Fund, budgeting, implementation and reporting